

PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU IPS SMP WILAYAH BINAAN KOTA SEMARANG DALAM MENGEMBANGKAN INDIKATOR DAN INSTRUMEN PENILAIAN MELALUI WORKSHOP DENGAN PERTEMUAN INDIVIDUAL PADA SEMESTER 2 TAHUN PELAJARAN 2014/2015

Roch Mulyati

Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang

***Abstract.** The research problem is the minimum ability of social studies teachers to develop the indicators of competencies and assessment instruments achievement. This study aims to improve the ability of social studies teachers to develop the indicators of achievement of competencies and assessment instruments through workshops and individual meetings. Determining the teachers' ability to develop the competencies achievement indicators, indicator scorecards were used which contains 8 aspects, whereas to determine the ability to develop assessment study instruments, the card consists of three aspects which contains 11 sub aspects were used. Workshops with individual meetings were taken to improve the teachers' ability. Workshop selected as an activity that integrates theory and practice as well as to meet the characteristics of adult learning, while the individual meeting were used to solve the problem of an individual nature and eliminate the psychological barriers of teachers who feel embarrassed to revealed problems in the workshop forum. Before the action was carried out, the number of teachers who are able to develop competence achievement indicator is 0%, after cycle 1 = 13.33% and after cycle 2 = 100%. Teachers who were able to compile an assessment instrument before action is taken, is 6.67%, after the first cycle = 60%, after 2 cycles to 100%.*

***Keywords:** competencies achievement indicators, assessment instruments, workshops, individual meetings.*

PENDAHULUAN

Tugas utama satuan pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk sanggup menerima tantangan jaman yang selalu berubah akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya transfor-

masi nilai-nilai budaya. Fenomena seperti ini sudah selayaknya disambut dengan baik dan dimaknai secara positif, karena bisa menjadi peluang terbukanya kesempatan dan tantangan yang sangat besar bagi guru untuk melaksanakan kewajibannya secara professional. Salah satu kewajiban profesi guru diatur

dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2, bahwa aktifitas guru dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah menyusun rencana pembelajaran. Jika dikaitkan dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 yang mengatur tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kompetensi pedagogik yang didalamnya menuntut guru untuk mampu mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Indikator yang dimaksud adalah indikator pencapaian kompetensi yaitu perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Sedangkan instrumen penilaian merupakan penilaian proses dan hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Indikator dan instrumen penilaian tersebut harus dirumuskan secara benar ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Ketentuan tersebut tercantum dalam Permendiknas RI nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Fungsi indikator pencapaian kompetensi dalam praktik pembelajaran selain sebagai pedoman dalam penyusunan penilaian hasil belajar juga berfungsi sebagai acuan guru untuk merancang aktifitas pembelajaran dan pemilihan materi/bahan ajar. Oleh karena itu jika indikator pencapaian kompetensi tidak dirumuskan secara benar, maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan tanpa arah, tidak efektif, dan peserta didik tidak mendapat kompetensi yang semestinya didapatkan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ranissa Delafini dkk, bahwa terdapat derajat keeratan kemampuan guru dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi terhadap kesiapan guru dalam mengajar atau terdapat pengaruh yang sangat kuat atas kemampuan guru dalam mengembangkan indikator pencapaian

kompetensi terhadap kesiapan guru dalam mengajar. Maka penguasaan guru dalam hal mengembangkan indikator pencapaian kompetensi sudah tidak bisa ditawar lagi. Instrumen penilaian juga harus dirumuskan sesuai kaidah penulisan soal, karena akan digunakan untuk mengukur kompetensi peserta didik dan hasilnya digunakan guru untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran. Dampaknya bagi peserta didik menjadi sangat dirugikan apabila prestasi dan nasibnya ditentukan dengan instrumen penilaian yang penyusunannya tidak memenuhi kaidah dan indikator yang benar. Bagi guru, hasil penilaian juga merupakan pertanggungjawaban atas kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan, dan pertanggungjawaban ini menjadi tidak berarti manakala memakai data yang dihasilkan dari alat ukur yang kualitasnya tidak baik. Namun pada kenyataannya guru IPS SMP Semarang kelompok binaan F belum sepenuhnya mampu merumuskan indikator pencapaian kompetensi ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran secara baik. Hal ini terlihat pada RPP semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 yang diperiksa oleh peneliti selaku pengawas SMP kelompok binaan F, ternyata hanya 53% guru yang mencantumkan indikator pencapaian kompetensi dalam RPP. Dari jumlah tersebut, hanya 22% yang indikatornya berbeda satu dengan yang lain, sedang sisanya terbagi dalam dua golongan yakni indikatornya sama persis tergabung dalam 45% dan sama persis dengan yang lain tergabung dalam kelompok 33%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru masih mengandalkan kebiasaan mencontoh/copy paste karya guru dari sekolah lain. Padahal dalam Standar Proses ada ketentuan bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP. Prinsip-prinsip penyusunan RPP diantaranya adalah harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik yang meliputi tingkat intelektual, motivasi, kecepatan belajar, dll. Secara alami tidak ada karakteristik

peserta didik yang sama, apalagi antar sekolah yang fasilitas belajarnya berbeda, maka seharusnya rencana pelaksanaan pembelajaran antar sekolah juga berbeda. Selain itu ditemukan juga bahwa baru 23,53% butir instrumen penilaian yang dirumuskan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Setelah dilakukan telaah lebih lanjut ternyata kemampuan guru memenuhi kaidah pada aspek materi masih rendah yaitu 26,70%, aspek konstruksi rata-rata hanya 50%, sedangkan pada aspek bahasa kemampuan guru sudah mencapai 94,5%. Mencermati tuntutan tugas sebagai guru profesional serta kondisi nyata yang ada di lapangan seperti diurai di atas, maka dipandang perlu untuk segera mencari jalan keluar agar guru memiliki kemampuan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan instrumen penilaian. Dalam Metode dan Teknik Supervisi yang diterbitkan oleh Depdiknas 2008, merekomendasikan digunakannya workshop oleh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial karena karakteristik peserta workshop memiliki pekerjaan/kebutuhan sejenis, menghadapi masalah relatif sama, dan sudah mempunyai bekal pengetahuan dan praktik. Hal ini sesuai dengan tugas pengawas sekolah sebagai pembimbing guru yang harus banyak menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi), untuk menambah pengetahuan dan keterampilan guru. Oleh karena itu apabila kegiatan workshop dirancang dan dilaksanakan dengan benar maka dampaknya akan luar biasa. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan guru yang bersifat individu, jalan keluarnya adalah melalui pertemuan individual. Cara ini bermanfaat untuk menghilangkan hambatan psikologis yang dimiliki oleh sebagian guru yang merasa malu mengungkapkan masalah serta gagasannya di depan forum. Pertemuan individual adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara pembina atau supervisor guru, guru dengan guru, mengenai usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Tujuan-

nya adalah untuk memberikan kemungkinan pertumbuhan jabatan guru melalui pemecahan kesulitan yang dihadapi, mengembangkan hal mengajar yang lebih baik, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan pada diri guru, dan menghilangkan atau menghindari segala prasangka yang bukan-bukan. (Depdiknas, 2008). Oleh karena itu metode ini dipilih agar permasalahan dan gagasan yang belum tersalurkan pada saat workshop dapat diakomodir untuk kebaikan bersama.

Berlandaskan kajian dan temuan diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah kegiatan workshop dan pertemuan individual dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan instrumen penilaian?

Tujuan dilakukannya penelitian tindakan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan guru IPS SMP Kota Semarang kelompok binaan F dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan instrumen penilaian melalui workshop dan pertemuan individual. Apabila tujuan ini tercapai, diharapkan kualitas pembelajaran semakin meningkat dan dampak positifnya dapat dirasakan oleh peserta didik.

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk memotivasi guru agar selalu berupaya memperbaiki kemampuannya dalam mengembangkan indikator dan menyusun instrumen penilaian. Sedangkan bagi kepala sekolah, bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam merencanakan program peningkatan kompetensi pedagogik guru di sekolah masing-masing. Penelitian ini juga bermanfaat untuk pengawas dan kepala sekolah dalam melakukan supervisi akademik yang sekaligus sebagai alternatif untuk memperbaiki proses pembelajaran.

METODE

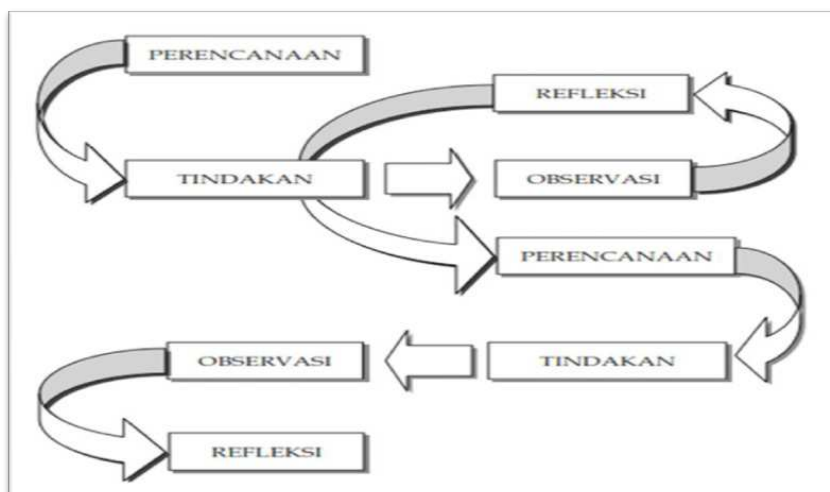
Subjek penelitian ini adalah guru IPS Kota Semarang wilayah binaan F yang meliputi 17 SMP yaitu: SMPN 5, SMPN 7, SMPN

13, SMPN 40, SMP Al-Irsyad, SMP AL-Kautsar, SMP Domenico Savio, SMP Ibu Kartini, SMP Maria Goretti, SMP Muhammadiyah 1, SMP Maria Regina, SMP Masehi 1, SMP Masehi 2, SMP Muhammadiyah 6, SMP YPE, SMP Al Madina, SMP Kartika III-1. Setiap sekolah diambil 1(satu) orang guru IPS untuk dijadikan sampel penelitian, namun karena ada 2(dua) orang guru yaitu dari SMP Maria Regina dan SMP Muhammadiyah 6 yang tidak mengikuti tindakan penelitian secara penuh maka sampel penelitian ini tinggal 15 guru dari 15 sekolah. Pengalaman mengajar guru bervariasi yaitu 0-5 thn sebanyak 13,33%, 6-10 thn sebanyak 6,67%, 11-15 thn sebanyak 26,67%, 16-20 thn sebanyak 13,33%, sedangkan yang mempunyai pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun sebanyak 40%. Sebanyak 86,67% guru telah memiliki sertifikat pendidik dan yang belum memiliki sertifikat pendidik berjumlah 13,33%. Pihak yang terlibat pada setiap siklus adalah pengawas wilayah binaan sebagai pengawas model dan pengawas wilayah binaan lain sebagai observer. Penelitian ini menggunakan dua siklus, yakni siklus I dan siklus II, dimana tiap siklus terdiri atas 4(empat) komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi, seperti bagan siklus penelitian tindakan sekolah model Kemmis dan McTaggart berikut ini:

Penelitian dilaksanakan pada semester 2 Tahun Pelajaran 2014/2015. Tindakan siklus I dilaksanakan pada 11 Februari 2015 di SMP Domenico Savio, pelaksanaan siklus II pada 10 Maret 2015 bertempat di SMP Maria Goretti.

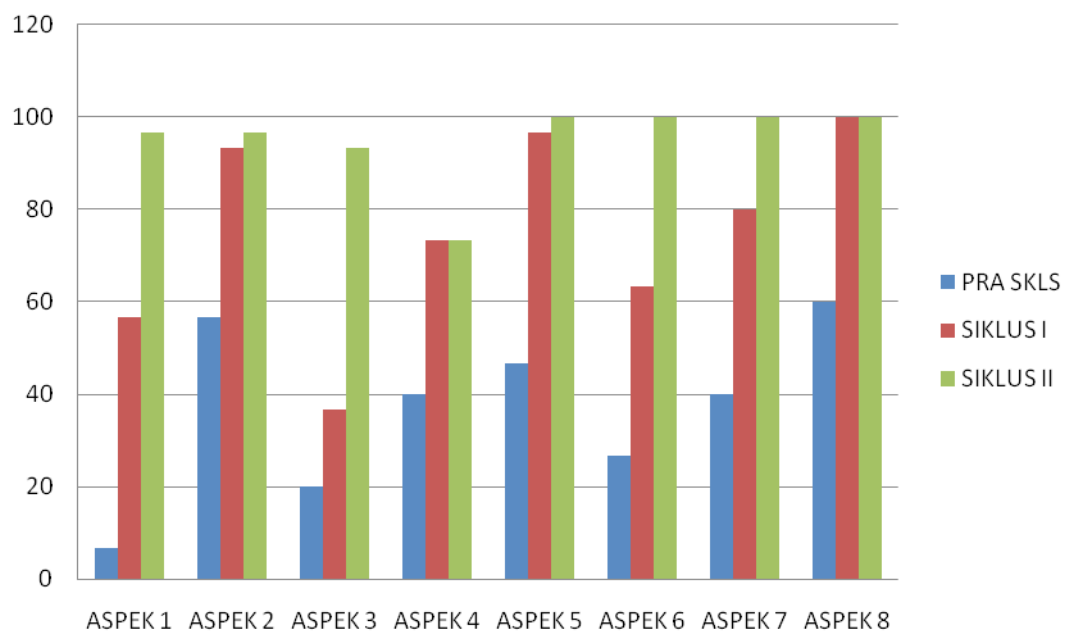
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan data pra tindakan, hasil siklus I, dan hasil siklus II dalam bentuk tabel untuk mengetahui aspek yang harus dipenuhi serta capaiannya dan perkembangan kemampuan tiap peserta. Disamping itu disajikan juga grafik untuk memudahkan melihat perkembangan kemampuan pemenuhan tiap aspek maupun perkembangan kemampuan tiap peserta.



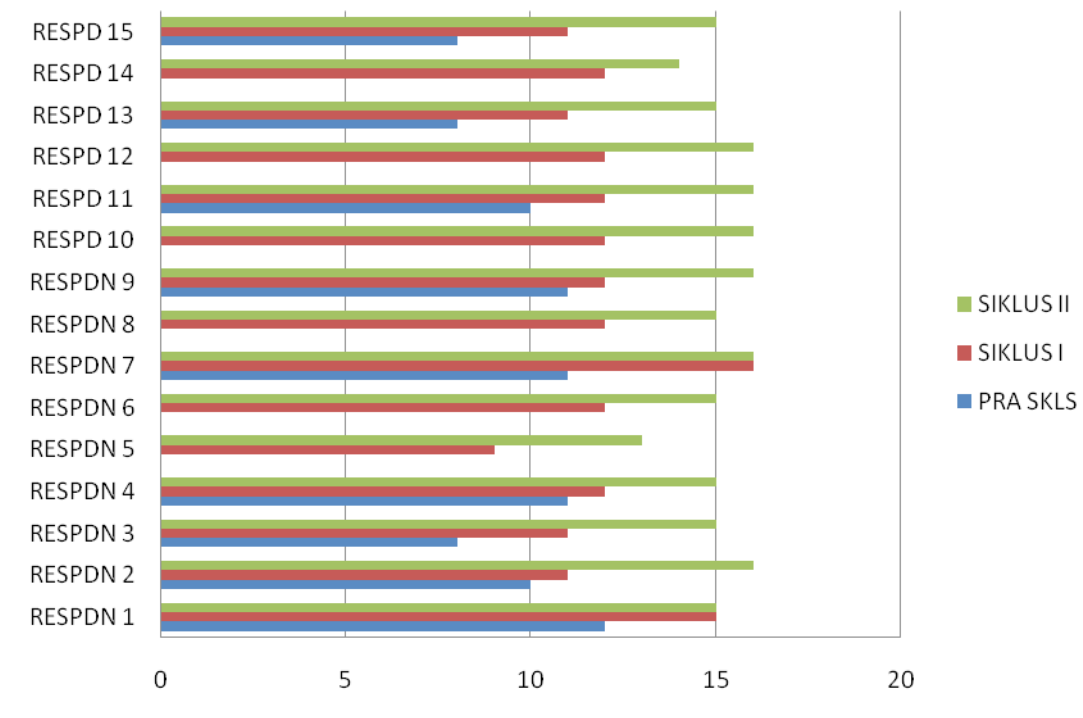
Tabel 1. Kemampuan mengembangkan tiap aspek indikator pencapaian kompetensi

No	Aspek	PRA	SIKUS I	SIKLUS II
1.	Ada indikator kunci yang mengukur kemampuan setara dengan kemampuan yang ada pada Kompetensi Dasar.	6,67	56,67	96,67
2	Ada indikator yang mendukung indikator kunci, yaitu kemampuan yang diperlukan dalam rangka untuk menguasai kemampuan yang dirumuskan oleh indikator kunci.	56,67	93,33	96,67
3	Ada indikator kompleks, yaitu indikator yang memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan tinggi.	20	36,67	93,33
4	Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional.	40	73,33	73,33
5	Setiap kompetensi dasar sekurang-kurangnya dikembangkan menjadi 3 kompetensi.	46,67	97,67	100
6	Kompetensi yang ditetapkan pada indikator bisa diraih oleh peserta didik dalam kurun waktu yang tersedia.	26,67	63,33	100
7	Indikator dirumuskan secara spesifik agar fokus pada satu kemampuan.	40	80	100
8	Kompetensi yang ada dalam indikator sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPS.	60	100	100

**Gambar 1. Perkembangan Kemampuan Mengembangkan Setiap Aspek Indikator**

Tabel 2. Daftar Responden

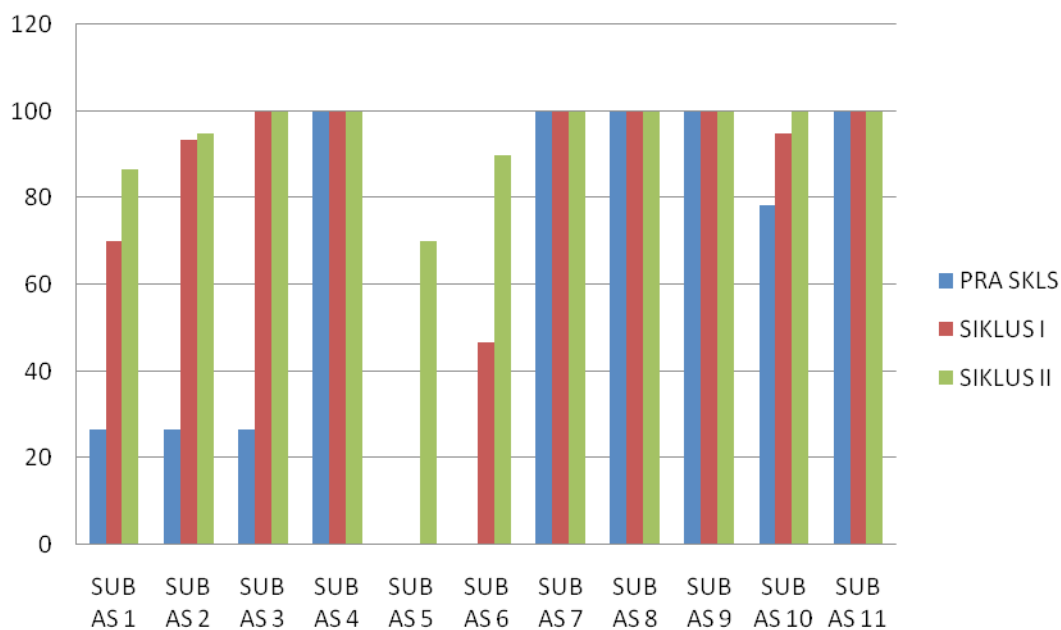
NO RESPONDEN	PRA	SIKLUS I	SIKLUS II
1	12	15	15
2	10	11	16
3	8	11	15
4	11	12	15
5	0	9	13
6	0	12	15
7	11	16	16
8	0	12	15
9	11	12	16
10	0	12	16
11	10	12	16
12	0	12	16
13	8	11	15
14	0	12	14
15	8	11	15



Gambar 2. Kemampuan guru mengembangkan indikator pencapaian kompetensi

Tabel 3. Kemampuan menyusun setiap aspek instrumen penilaian.

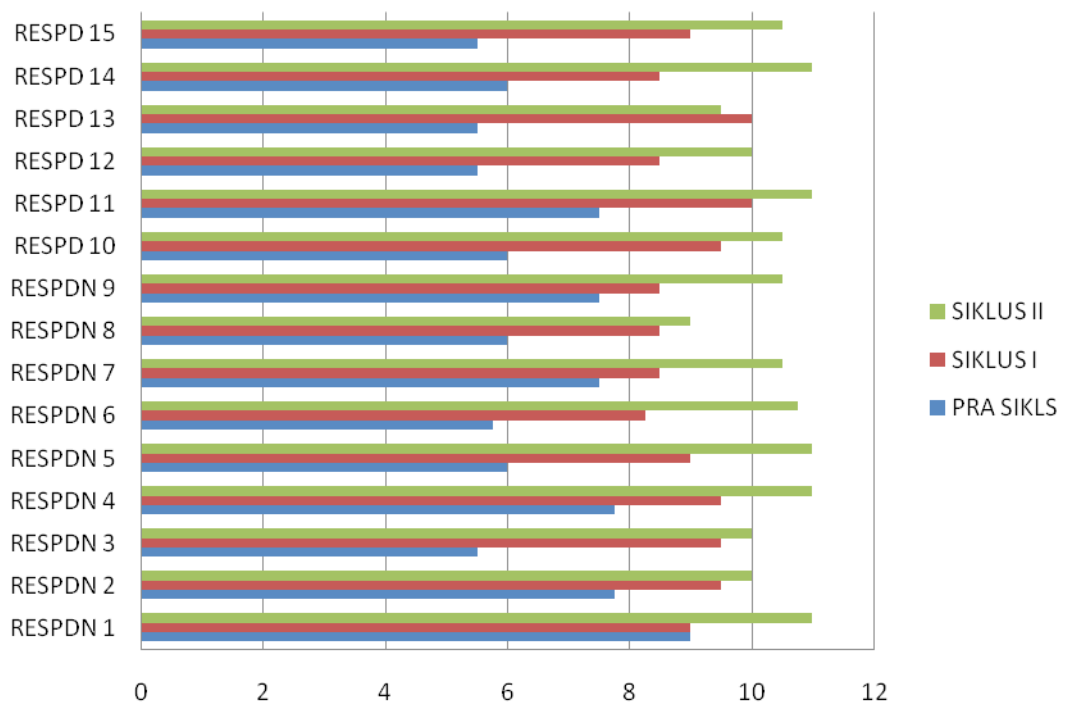
NO	ASPEK	PRA	SIKLUS I	SIKLUS II
A Materi				
1	Soal sesuai dengan indikator.	26,67	70	86,67
2	Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang lingkup) jelas.	26,67	93,33	95
3	Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, atau tingkat kelas.	26,67	100	100
B Konstruksi				
4	Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai.	100	100	100
5	Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal.	0	0	70
6	Ada pedoman penskoran	0	46,67	90
7	Hal-hal lain yang menyertai soal, seperti tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.	100	100	100
C Bahasa				
8	Rumusan kalimat soal komunikatif.	100	100	100
9	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.	100	100	100
10	Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda.	78,33	95	100
11	Soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan siswa.	100	100	100



Gambar 3. Perkembangan Kemampuan Mengembangkan Setiap Aspek Indikator

Tabel 4. Kemampuan guru menyusun instrumen penilaian

NO RESPONDN	PRA SIKLUS	SIKLUS I	SIKLUS II
1	9	9	11
2	7,75	9,50	10
3	5,50	9,50	10
4	7,75	9,50	11
5	6	9	11
6	5,75	8,25	10,75
7	7,50	8,50	10,50
8	6	8,50	9
9	7,5	8,50	10,50
10	6	9,50	10,50
11	7,50	10	11
12	5,50	8,50	10
13	5,50	10	9,50
14	6	8,50	11
15	5,50	9	10,50

**Gambar 4. Perkembangan Kemampuan Menyusun Instrumen**

Pembahasan

Kemampuan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi.

Pada saat **pra tindakan** tidak ada guru yang mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan semua kaidah pengembangan belum dipenuhi. Lewat angket yang harus direspon oleh guru diketahui bahwa baru 64,70% guru yang mengetahui kaidah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi, tetapi hanya 41,18% guru yang merasa sudah menerapkan kaidah tersebut. Alasan tidak mengimplementasikan adalah: jika mengimplementasikan menghabiskan pikiran dan waktu sebanyak 47,06%, dan jika tidak mengimplementasikan tidak ada yang memperlakukan sebanyak 52,94%. Setelah **siklus 1** terdapat 13,33% guru mampu mengembangkan indikator dengan 50% kaidah sudah terpenuhi dengan baik. Setelah **siklus 2** hasilnya semua guru mampu mengembangkan indikator, namun aspek penggunaan kata kerja operasional dalam merumuskan indikator masih perlu ditingkatkan. Mengingat fungsi indikator dalam pembelajaran selain sebagai pedoman untuk membuat instrumen penilaian, juga sebagai acuan guru dalam merancang aktifitas dan pemilihan materi pembelajaran, maka fungsi kontrol kepala sekolah sangatlah penting. Kepala sekolah diharapkan tidak sekedar membubuhkan tanda tangan pada RPP tetapi koreksi dan bimbingan harus selalu menyertai.

Kemampuan guru menyusun instrumen penilaian.

Kondisi pada saat **pra tindakan** baru 6,67% guru yang mampu menyusun instrumen penilaian, dari 11 sub aspek yang harus dipenuhi baru terpenuhi 45,45%. **Siklus 1**

60% guru sudah mampu menyusun instrumen penilaian dengan 72,73% sub aspek sudah terpenuhi secara baik. Setelah **siklus 2** semua guru sudah mampu menyusun instrumen penilaian, namun kebiasaan guru tidak menuliskan petunjuk tentang cara mengerjakan soal masih saja terjadi, mereka beranggapan semua peserta didik sudah memahami. Melalui angket yang diberikan sebelum tindakan diketahui bahwa semua guru telah mengetahui kaidah penyusunan instrumen penilaian namun tidak menggunakannya ketika menyusun soal, 69,23% beralasan karena tidak ada pihak yang memperlakukan. Mencermati alasan yang disampaikan, peran kepala sekolah dan pengawas perlu ditingkatkan utamanya pada fungsi supervisi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Workshop disertai pertemuan individual terbukti efektif meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan menyusun instrumen penilaian. Respon guru sangat baik ketika diberi kesempatan untuk mengikuti workshop dan pertemuan individual, bahkan para guru menginginkan kegiatan seperti ini dilakukan secara periodik dengan materi dan kompetensi yang berbeda.

Saran

Guru atas kesadaran pribadi hendaknya selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya lewat berbagai sumber agar mampu menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan jaman. Kepala sekolah bersama pengawas sekolah perlu lebih bersinergi untuk menguatkan kompetensi dan tanggung jawab guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aff,Anas.2012.*Workshop dan jenisnya*.
<http://anasaff.blogspot.com/2012/08>.
- Direktorat Jenderal PMPTK.2008.*Metode dan Teknik Supervisi*.Jakarta:Depdiknas.
- Jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/4380 (Jurnal Kultur Demokrasi vol 2, No 4. 2014.
- Mulyasa. 2010. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.*
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.*
- Sahertian,A.2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Safari. 2005. *Penulisan butir soal berdasarkan penilaian berbasis kompetensi*. Jakarta: Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*